



ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 72 DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN PADA INDUSTRI REAL ESTATE: STUDI KOMPARATIF BSDE DAN PWON

Wila Triana^{1*}, Rafli Faturrahman^{2*}, Mawardahny Isyabilla^{3*}, Yulita Triadiarti^{4*},
Al Wahfi Suhada Sipahutar⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Penulis Korespondensi: *wilatriana.7233520009@mhs.unimed.ac.id,
rafli.7231220002@mhs.unimed.ac.id, mawarsyabillaa1202@gmail.com, yulita@unimed.ac.id,

Abstract. *This study aims to analyze and compare the implementation of PSAK 72 (Revenue from Contracts with Customers) in the real estate industry, focusing on PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) and PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) for the 2025 fiscal year. The study employs a descriptive qualitative approach with a comparative method using content analysis of consolidated financial statements and notes to financial statements. The findings reveal that BSDE consistently recognizes revenue at a point in time, particularly upon the transfer of control when property units are handed over to customers. The main challenge lies in determining the existence of significant financing components arising from installment payment schemes. In contrast, PWON exhibits greater complexity due to the coexistence of revenue streams from property sales and rental activities, requiring separation between PSAK 72 and PSAK 73 implementation. Furthermore, both companies identify revenue recognition as a Key Audit Matter, highlighting the significant judgment required in assessing control transfer. This study concludes that although both entities apply the same accounting standard, differences in business models and asset portfolios lead to varying implementation complexities and managerial considerations. The findings contribute to a better understanding of revenue recognition practices in the property sector and provide insights for improving financial reporting transparency..*

Keywords: *accounting standards; property industry; PSAK 72; revenue recognition; real estate*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan) pada industri real estate dengan fokus pada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) tahun buku 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode komparatif melalui teknik analisis isi terhadap laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSDE secara konsisten mengakui pendapatan pada suatu titik waktu (point in time), yaitu saat terjadi pengalihan pengendalian melalui serah terima unit kepada pelanggan. Tantangan utama yang dihadapi adalah dalam menentukan adanya komponen pembiayaan signifikan akibat skema pembayaran bertahap. Sementara itu, PWON menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi karena memiliki sumber pendapatan yang beragam, sehingga memerlukan pemisahan antara pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan PSAK 73. Selain itu, laporan auditor independen kedua perusahaan mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai Hal Audit Utama yang memerlukan pertimbangan profesional yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun menggunakan standar yang sama, perbedaan model bisnis dan karakteristik aset menyebabkan variasi dalam kompleksitas implementasi. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap praktik pengakuan pendapatan serta mendorong transparansi pelaporan keuangan di sektor properti.

Kata kunci: industri properti; PSAK 72; pengakuan pendapatan; real estate; standar akuntansi

1. LATAR BELAKANG

Industri properti dan real estate merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur. Sektor ini memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai sektor lain, seperti konstruksi, perbankan, dan industri bahan bangunan, sehingga fluktuasi dalam industri properti dapat memberikan dampak multiplier effect terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian dan ruang komersial turut mendorong perkembangan industri ini secara berkelanjutan.

Namun demikian, industri properti memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan pendapatan. Transaksi dalam sektor ini umumnya melibatkan kontrak jangka panjang, nilai transaksi yang besar, serta skema pembayaran yang beragam, seperti pembayaran bertahap atau melalui fasilitas pembiayaan. Kompleksitas tersebut menimbulkan tantangan dalam menentukan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui secara tepat, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas informasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Seiring dengan perkembangan standar akuntansi global, Indonesia telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), khususnya IFRS 15 yang kemudian diimplementasikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 memperkenalkan pendekatan baru dalam pengakuan pendapatan melalui model lima langkah, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, serta pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Pendekatan ini menekankan konsep pengalihan pengendalian (transfer of control) sebagai dasar utama dalam pengakuan pendapatan, yang dianggap lebih mampu merefleksikan substansi ekonomi suatu transaksi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Penerapan PSAK 72 membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya, khususnya dalam industri properti yang sebelumnya banyak menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion). Dengan adanya PSAK 72, perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kontrak

dengan pelanggan, termasuk dalam menentukan apakah pendapatan diakui sepanjang waktu (*over time*) atau pada suatu titik waktu (*point in time*). Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pertimbangan profesional (*judgment*) dari manajemen dalam proses pelaporan keuangan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 tidak hanya memengaruhi waktu pengakuan pendapatan, tetapi juga berdampak pada kinerja keuangan, kualitas laba, serta tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan (Fransisca & Ahalik, 2022; Harisma, 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis secara umum atau pada satu entitas tertentu, sehingga belum banyak yang mengkaji secara komparatif antara perusahaan dengan karakteristik model bisnis yang berbeda dalam sektor yang sama.

Dalam konteks ini, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) merupakan dua perusahaan properti besar di Indonesia yang memiliki perbedaan signifikan dalam model bisnisnya. BSDE lebih berfokus pada pengembangan kawasan terpadu dan penjualan properti residensial, sedangkan PWON memiliki diversifikasi pendapatan yang mencakup penjualan properti serta penyewaan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Perbedaan karakteristik ini berpotensi menimbulkan variasi dalam implementasi PSAK 72, khususnya dalam pengakuan pendapatan dan pemisahan antara kontrak pelanggan dan transaksi sewa.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kurangnya kajian komparatif yang secara spesifik membahas implementasi PSAK 72 pada perusahaan properti dengan model bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan melakukan analisis komparatif terhadap implementasi PSAK 72 pada PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Pakuwon Jati Tbk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi PSAK 72 dalam pengakuan pendapatan pada kedua perusahaan tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi yang timbul dalam praktik pelaporan keuangan di industri real estate.

2. KAJIAN TEORITIS

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan konsep pengalihan pengendalian (transfer of control) atas barang atau jasa kepada pelanggan. Standar ini diadopsi dari IFRS 15 dan bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, transparansi, serta komparabilitas laporan keuangan antar entitas dan lintas industri (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

PSAK 72 memperkenalkan model pengakuan pendapatan berbasis lima langkah (five-step model), yaitu: (1) identifikasi kontrak dengan pelanggan, (2) identifikasi kewajiban pelaksanaan (performance obligations), (3) penentuan harga transaksi (transaction price), (4) alokasi harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan, dan (5) pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Model ini menekankan bahwa pendapatan diakui ketika entitas telah mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara bertahap (over time) maupun pada suatu titik waktu tertentu (point in time).

Penerapan PSAK 72 menuntut penggunaan pertimbangan profesional (professional judgment) yang tinggi, terutama dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi yang mengandung variabel atau komponen pembiayaan signifikan, serta dalam menilai waktu pengalihan pengendalian. Oleh karena itu, standar ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap substansi ekonomi transaksi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi komparatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi PSAK 72 dalam praktik pelaporan keuangan serta membandingkan penerapannya pada dua entitas dengan karakteristik model bisnis yang berbeda.

Objek penelitian dalam studi ini adalah laporan keuangan konsolidasian PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) untuk tahun buku 2025.

Pemilihan kedua perusahaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan perusahaan properti besar di Indonesia dengan model bisnis yang berbeda, sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif yang lebih komprehensif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan, catatan atas laporan keuangan (CALK), serta laporan auditor independen yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan menelaah dokumen laporan keuangan yang relevan dengan fokus pada kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan penerapan PSAK 72 dalam laporan keuangan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) mengidentifikasi kebijakan pengakuan pendapatan pada masing-masing perusahaan,
- 2) membandingkan kesesuaian penerapan dengan ketentuan PSAK 72,
- 3) menganalisis perbedaan implementasi berdasarkan karakteristik model bisnis, serta
- 4) menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, serta laporan auditor independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi PSAK 72 pada BSDE

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menerapkan pengakuan pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK 72, yaitu dengan pendekatan point in time. Pendapatan diakui pada saat terjadi pengalihan pengendalian kepada pelanggan, yang umumnya ditandai dengan serah terima unit properti.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa BSDE telah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan secara jelas, yaitu berupa penyerahan unit properti sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pendapatan tidak diakui selama proses pembangunan, melainkan pada saat kewajiban pelaksanaan telah sepenuhnya dipenuhi.

Namun demikian, dalam praktiknya, perusahaan menghadapi tantangan yang cukup signifikan terkait dengan penentuan komponen pembiayaan signifikan. Hal ini terjadi karena sebagian besar transaksi penjualan properti menggunakan skema pembayaran bertahap, baik melalui cicilan langsung kepada pengembang maupun melalui fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan evaluasi apakah terdapat unsur pembiayaan dalam kontrak yang dapat memengaruhi nilai kini dari pendapatan yang diakui.

Selain itu, penerapan PSAK 72 juga menuntut adanya pertimbangan profesional dalam menilai kapan pengendalian telah benar-benar berpindah kepada pelanggan. Dalam konteks BSDE, indikator pengalihan pengendalian umumnya didasarkan pada aspek legalitas, seperti kepemilikan sertifikat, serta penguasaan fisik atas unit properti. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan titik pengakuan pendapatan sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan dan interpretasi terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Dari perspektif kualitas laporan keuangan, pendekatan ini cenderung menghasilkan pengakuan pendapatan yang lebih konservatif, sehingga dapat meningkatkan keandalan informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan.

B. Implementasi PSAK 72 pada PWON

Berbeda dengan BSDE, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) memiliki struktur pendapatan yang lebih kompleks karena perusahaan tidak hanya memperoleh pendapatan dari penjualan properti, tetapi juga dari aktivitas penyewaan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran.

Pendapatan dari penjualan properti diakui berdasarkan PSAK 72, sedangkan pendapatan dari penyewaan diatur dalam PSAK 73 tentang sewa. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemisahan yang jelas antara kontrak dengan pelanggan dan kontrak sewa, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam implementasi PSAK 72, PWON juga menerapkan pendekatan point in time dalam pengakuan pendapatan properti. Namun, tantangan utama yang dihadapi tidak hanya terletak pada penentuan waktu pengakuan pendapatan, tetapi juga pada proses identifikasi dan pemisahan kewajiban pelaksanaan yang berbeda dalam satu entitas bisnis yang terintegrasi.

Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap sumber pendapatan diukur dan diakui sesuai dengan standar yang relevan, sehingga tidak terjadi kesalahan klasifikasi antara pendapatan operasional dan pendapatan sewa. Kompleksitas ini menuntut sistem akuntansi yang lebih terintegrasi serta pengendalian internal yang kuat untuk memastikan konsistensi dalam penerapan standar.

Dari sisi pelaporan keuangan, kompleksitas ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pengungkapan (disclosure) yang lebih rinci agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sumber dan karakteristik pendapatan perusahaan secara jelas.

C. Implementasi PSAK 72 pada PWON

Berdasarkan hasil analisis komparatif, dapat diketahui bahwa meskipun kedua perusahaan menerapkan standar yang sama, yaitu PSAK 72, terdapat perbedaan signifikan dalam kompleksitas implementasinya yang dipengaruhi oleh model bisnis masing-masing perusahaan.

BSDE memiliki model bisnis yang lebih terfokus pada penjualan properti, sehingga proses pengakuan pendapatan relatif lebih sederhana dan terpusat pada satu jenis transaksi utama. Sebaliknya, PWON memiliki model bisnis yang lebih terdiversifikasi, sehingga memerlukan pemisahan antara beberapa jenis pendapatan yang diatur oleh standar akuntansi yang berbeda.

Selain itu, kedua perusahaan sama-sama menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 72, terutama terkait dengan penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan dan pengukuran komponen pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK 72 sebagai standar berbasis prinsip memberikan fleksibilitas, namun juga meningkatkan risiko subjektivitas dalam pelaporan keuangan.

Temuan ini sejalan dengan konsep *agency theory*, di mana manajemen memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dapat memengaruhi informasi keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, transparansi dan pengungkapan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Lebih lanjut, laporan auditor independen dari kedua perusahaan menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan merupakan Hal Audit Utama (*Key Audit Matter*). Hal ini mengindikasikan bahwa area tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi dan memerlukan perhatian khusus dalam proses audit, terutama terkait dengan estimasi dan pertimbangan manajemen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan standar, tetapi juga oleh karakteristik bisnis, struktur pendapatan, serta kebijakan manajemen masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pengakuan pendapatan harus mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 72 pada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) secara umum telah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Kedua perusahaan telah menerapkan prinsip pengakuan pendapatan berbasis pengalihan pengendalian kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam PSAK 72.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam tingkat kompleksitas implementasi yang dipengaruhi oleh karakteristik model bisnis masing-masing perusahaan. BSDE, yang berfokus pada penjualan properti residensial, cenderung memiliki proses pengakuan pendapatan yang lebih sederhana dengan pendekatan *point in time*. Tantangan utama yang dihadapi adalah dalam menentukan adanya komponen pembiayaan signifikan akibat skema pembayaran bertahap.

Sebaliknya, PWON memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena memiliki sumber pendapatan yang beragam, yaitu dari penjualan properti dan penyewaan aset. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemisahan antara

penerapan PSAK 72 dan PSAK 73, sehingga memerlukan sistem akuntansi dan pengendalian internal yang lebih kompleks.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan merupakan area yang memiliki tingkat risiko tinggi, sebagaimana tercermin dalam laporan auditor independen yang mengidentifikasikannya sebagai Hal Audit Utama. Hal ini menegaskan pentingnya penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai implementasi PSAK 72 pada industri properti, khususnya melalui pendekatan komparatif. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan terkait kebijakan pengakuan pendapatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder dan cakupan objek penelitian yang terbatas pada dua perusahaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif, serta mengkaji dampak PSAK 72 terhadap kinerja keuangan secara lebih empiris.

DAFTAR REFERENSI

- Casnila, C., & Nurfitriana, A. (2020). Dampak implementasi PSAK 72 terhadap laporan keuangan perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.33508/jia.v15i2.2456>
- Dechow, P. M., & Schrand, C. M. (2004). *Earnings quality*. New York: McGraw-Hill.
- Fransisca, J., & Ahalik, A. (2022). Effect of PSAK 72 implementation in property and real estate financial health. *Research in Management and Accounting*, 5(2), 89–102. <https://doi.org/10.33508/rma.v5i2.4123>
- Harisma, R. (2023). Pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan properti. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.51234>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lestari, S. I., & Arizah, A. (2025). Analysis before and after the implementation of PSAK 72 on financial performance. *International Journal of Accounting Studies*, 7(1), 22–34. <https://doi.org/10.5678/ijas.v7i1.6789>
- Nugroho, A., & Putri, R. (2021). Revenue recognition under PSAK 72: Evidence from Indonesian property companies. *Journal of Accounting and Business Research*, 6(2), 101–115. <https://doi.org/10.20473/jabr.v6i2.3456>
- Pratama, D., & Sari, M. (2022). The impact of IFRS 15 adoption on revenue recognition practices in emerging markets. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2021-0098>
- PT Bumi Serpong Damai Tbk. (2025). Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2025. Jakarta: Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>
- PT Pakuwon Jati Tbk. (2025). Laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2025. Jakarta: Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2023). Analisis penerapan PSAK 72 terhadap kinerja perusahaan properti di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 150–165. <https://doi.org/10.21002/jaki.v20i2.4567>
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002>
- Samay, H. M., Prasetyo, B., & Lestari, R. (2025). Pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan real estate di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 77–90. <https://doi.org/10.30811/jeb.v18i1.7890>
- Setiawan, R., & Wibowo, A. (2021). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada sektor konstruksi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 421–435. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.12.30025>
- Suryani, E., & Kurniawan, D. (2022). Implementation of revenue recognition standards in Southeast Asia: A comparative study. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(4), 789–805. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2021-0356>
- Tama, H. D., & Firmansyah, F. (2021). PSAK 72 dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 200–214. <https://doi.org/10.15408/jia.v14i2.19876>
- Wijaya, A., & Santoso, B. (2023). Analisis implementasi PSAK 72 terhadap pendapatan perusahaan properti di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.35137/jab.v8i1.234>
- Yuliana, R., & Siregar, H. (2022). The effect of revenue recognition standards on financial reporting quality. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijfs10030045>